

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konstitusi Maroko telah mendeklarasikan diri sebagai negara Muslim yang berdaulat dengan Islam sebagai agama negaranya, namun tetap menjamin kebebasan berfikir, berekspresi, berkumpul, dan kebebasan dalam hal kepercayaan kepada masyarakatnya sebagai ciri dasar Islam Sunni Maliki.<sup>1</sup> Maroko adalah salah satu negara di Afrika dengan 99% penduduk mayoritas beragama Islam dengan GDP tahun 2015 lebih kurang sebanyak 110 juta dollar.<sup>2</sup> Pemimpin Maroko, Raja Mohammed VI dikenal sebagai *Commander of the Faithful* yang mana status tersebut diberikan kepadanya dan mendapat banyak pengakuan bahkan di beberapa negara di Afrika Barat terutama komunitas Tidjane.<sup>3</sup> Pengakuan tersebut didasari oleh sejarah hubungan Maroko dengan Afrika Barat selama masa pra kolonial sekitar abad-11, dimana saat itu sebagian besar dari wilayah Afrika Barat mengadopsi Islam dikarenakan *jihad* dari Almoravids yaitu sebuah dinasti berber dari Maroko.<sup>4</sup>

Afrika Barat sebagai rumah dari 190 juta umat Muslim yang tersebar di negara seperti Guinea, Mauritania, Gambia, Niger, Senegal dan *Cote d'Ivoire* terdiri dari *The Tijaniyyah Brotherhood*, kelompok Sufi dari Islam Sunni

---

<sup>1</sup> King Mohammed VI, Speech from the Throne, 30 July 2003.

<sup>2</sup> World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>

<sup>3</sup> Mohamed Chtatou, "This is something that can easily be copycatted in other countries of the Muslim world," May 2016, <https://yourmiddleeast.com/2016/05/19/this-is-something-that-can-easily-be-copycatted-in-other-countries-of-the-muslim-world/> (diakses pada 15 Agustus 2018).

<sup>4</sup> Ghita Tadlaoui, "Morocco's religious diplomacy in Africa," *FRIDE Policy Brief* No.196, (Februari 2015): 2.

menjembatani hubungan Maroko dengan Afrika Barat.<sup>5</sup> Dari 17 negara di kawasan Afrika Barat, beberapa diantaranya baik yang berbatasan langsung dengan Maroko atau tidak, memiliki mayoritas penduduk muslim seperti Gambia, Guinea, Mali, Mauritania, Senegal dan beberapa negara lainnya. Dari keterikatan sejarah secara religius inilah Afrika Barat merupakan kawasan penting bagi Maroko untuk memperluas jangkauan diplomasinya termasuk tidak hanya dalam hubungan keagamaan namun juga dalam bidang ekonomi.

Selain keterikatan sejarah religius Maroko dengan negara-negara di kawasan Afrika Barat, terdapat beberapa faktor lainnya yang membuat Afrika Barat menjadi kawasan penting bagi Maroko. Pertama, dari segi kekayaan alam, Maroko bukan termasuk salah satu negara penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di wilayah Afrika seperti Mesir, Libya, Aljazair dan beberapa negara Afrika lainnya. Oleh sebab itu Maroko harus mencari jalan lain untuk menunjukkan eksistensinya terutama di kawasan Afrika. Kedua, Maroko secara geografis berada di posisi strategis berbatasan dengan Spanyol di sebelah utara terpisah oleh selat Gibraltar yang menjadi tempat pertemuan dua samudera yaitu Atlantik dan Mediterania. Posisi strategis sebagai pintu masuk serta jembatan penghubung antara benua Eropa dan Afrika ini menjadi salah satu keuntungan yang dimiliki negara Maroko yang sangat berguna bagi aktivitas ekonomi dan diplomatik negaranya. Keterikatan hubungan baik dari segi sejarah religius maupun geopolitik antara Maroko dan negara-negara Afrika Barat menjadikannya sebagai target Maroko untuk menjalankan kebijakan luar negerinya melalui diplomasi religiusnya.

---

<sup>5</sup>Tadlaoui, "Morocco's religious diplomacy," 2.

Dalam dinamika regional, Maroko beberapa tahun terakhir mulai memberikan perhatian lebih terhadap Afrika dengan memperkuat kembali hubungannya dengan Uni Afrika. Maroko merupakan satu-satunya negara di Afrika yang tidak tergabung ke dalam Uni Afrika namun pada Januari 2017 Maroko kembali bergabung ke Uni Afrika setelah meninggalkan organisasi pada 1984 terkait permasalahan pengakuan kemerdekaan wilayah Sahara Barat oleh Uni Afrika yang 2/3 wilayahnya dibawah kendali Maroko dan wilayah tersebut dianggap sebagai bagian dari teritorial negaranya.<sup>6</sup> Bergabungnya Maroko kembali ke Uni Afrika tidak semata mempengaruhi kependudukan Maroko di wilayah Sahara Barat yang telah diambil alih oleh Maroko semenjak 1975. Hal ini masih menjadi konflik antara Maroko dengan negara-negara di Afrika yang setuju dengan pelepasan wilayah Sahara Barat sebagai wilayah yang merdeka. Perubahan arah kebijakan luar negeri Maroko ke wilayah Afrika semakin terlihat saat Maroko mengajukan pendaftaran sebagai anggota *The Economic Community of West Africa States* (ECOWAS) pada Februari 2017.<sup>7</sup>

*Religious diplomacy* atau diplomasi keagamaan dapat digambarkan sebagai aktivitas negara yang terdiri dari penggunaan faktor agama dalam kebijakan luar negeri; yaitu, seluruh rangkaian mekanisme kerja sama negara dengan asosiasi keagamaan dalam mengejar kepentingan nasional, penggunaan aktivitas internasional dari institusi keagamaan, gagasan dan simbol keagamaan dan lainnya.<sup>8</sup> *Religious Diplomacy* sendiri juga dilakukan oleh beberapa negara

---

<sup>6</sup> Anonymous, "Morocco to Rejoin African Union despite Western Sahara dispute," 30 Januari 2017, <https://www.bbc.com/news/world-africa-38795676> (diakses 10 Desember 2018).

<sup>7</sup> Anonymous, "Ecowas agrees to admit Morocco to West African body," 5 Juni 2017, <https://www.bbc.com/news/world-africa-40158089> (diakses 22 Maret 2019).

<sup>8</sup> Alicja Curanovic, "The Religious Diplomacy of The Russian Federation," *Russia/NIS Center Report No 12*, (Juni 2012) : 9.

besar seperti Rusia dan Turki. Seperti halnya Maroko, Turki juga menggunakan agama Islam sebagai diplomasi keagamaannya hanya saja karena beberapa alasan diplomasi keagamaan tidak terlalu terpakai dalam kebijakan luar negeri Turki sendiri dan masih hanya sebatas kebijakan domestik.<sup>9</sup>

Diplomasi keagamaan Maroko berakar dari kebijakan domestik tentang keagamaan negaranya yang mulai menjadi bagian dari pemerintah semenjak serangan teroris di kota Casablanca oleh kelompok Salafia Jihadia pada tahun 2003 yang menjadi serangan teror terbesar yang terjadi di Maroko.<sup>10</sup> Serangan bom bunuh diri yang terjadi di kota terbesar Maroko, Casablanca membunuh 41 orang dan melukai 100 orang lainnya.<sup>11</sup> Selain itu serangan teroris lainnya di Maroko dan beberapa wilayah Eropa lainnya yang dikaitkan dengan radikalisme menimbulkan sebuah stigmanisasi Maroko sebagai negara pengekspor teroris karena pelaku-pelaku teroris sebagian besar berasal dari Maroko dalam beberapa kasus terorisme di Afrika dan Eropa ditambah kurang lebih 2000 warga Maroko bergabung ke dalam ISIS. Akibatnya negara Maroko mengeluarkan pernyataan bahwa negaranya akan mulai merestrukturisasi *religious sphere* negaranya yang dinyatakan oleh Mbarka Bouaida, Menteri Luar Negeri Maroko.<sup>12</sup>

Pembaharuan skruktur kebijakan luar negeri Maroko dalam ruang religius diupayakan secara institusional yaitu dengan mengatur ulang dewan cendikiawan agama, merevisi kurikulum pendidikan sekolah umum, menciptakan stasiun

---

<sup>9</sup> Mehmed Ozkan, "Turkey's Religious Diplomacy", 3.

<sup>10</sup> King Mohammed VI, Speech from the Throne, 30 July 2003.

<sup>11</sup> Anonymous, "Terror blast rock Casablanca," <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3035803.stm> (diakses 10 Desember 2018).

<sup>12</sup> Ann Marie Wainscott, "Religious Regulation as Foreign Policy: Morocco's Islamic Diplomacy in West Africa," *Religion and Politics Section of the American Political Science Association, Miami University*, (2017): 7.

televisi dan radio tentang keagamaan.<sup>13</sup> Perkembangan kebijakan luar negeri Maroko yang lainnya salah satunya dengan merealisasikan pembangunan sebuah institut pelatihan Imam-Imam dari luar negeri terutama dari negara-negara Afrika Barat untuk menyebarkan paham Islam yang Moderat ke wilayah-wilayah Afrika juga sebagai bentuk *joint fight againts terrorism*.<sup>14</sup> Raja Maroko meresmikan *Mohammed VI Institute for the Training of Imams, Morchidins, and Morchidates* pada 27 Maret 2015, sebuah pusat pembelajaran yang tidak hanya ditujukan bagi Imam, *Morchidins* dan *Morchidates* Maroko, namun juga sebagian besar Imam-Imam dari Eropa, Asia, terutama negara-negara Afrika Barat.<sup>15</sup> *Mohammed VI Institute for the Training of Imams, Morchidins, and Morchidates* ini didirikan bertujuan sebagai penanaman nilai bersama untuk melawan terorisme dan islamis extremismisme yang masih menjadi *threat* dan isu hangat di dunia sampai hari ini.<sup>16</sup>

Dengan didirikannya akademi pembelajaran Imam, *Morchidins*, dan *Morchidates* di Rabat ini dianggap sebagai satu langkah *religious diplomacy* oleh Maroko dengan bergabungnya Imam-Imam dan *scholars* dari berbagai negara terutama kawasan Afrika, diharapkan nantinya membawa nilai-nilai Islam moderat yang digunakan di Maroko yang diajarkan di Akademi pembelajaran Imam Mohammed VI ke negara asalnya.<sup>17</sup> Pembangunan pusat pelatihan Imam senilai 20 juta dolar ini dianggap relatif besar jika disandingkan dengan GDP Maroko tahun 2015 yang hanya 110 juta dolar. Pusat pelatihan Imam yang

---

<sup>13</sup> Wainscott, "Religious Regulation", 7.

<sup>14</sup> Cédric Baylocq and Aziz Hlaoua, "Spreading a "Moderate Islam"? Morocco's New African religious Diplomacy," *Afrique Contemporaine* No.257, [https://www.cairn-int.info/article-E\\_AFCO\\_257\\_0113--spreading-a-moderate-islam-morocco-s-new.htm](https://www.cairn-int.info/article-E_AFCO_257_0113--spreading-a-moderate-islam-morocco-s-new.htm).

<sup>15</sup> Cédric Baylocq and Aziz Hlaoua, "Spreading a "Moderate Islam".

<sup>16</sup> Abdelmalek Alaoui, "Why Morocco Wants to Become A Major Islamic Training Hub," *Forbes*, 31 Maret 2015, <https://www.forbes.com/sites/abdelmalekalaoui/2015/03/31/why-morocco-wants-to-become-a-major-islamic-training-hub/#3411abdd61e0>(diakses 15 Agustus 2018).

<sup>17</sup> Cédric Baylocq and Aziz Hlaoua, "Spreading a "Moderate Islam", 107.

mengangkat nilai Islam Moderat ini kontras dengan nilai Islam Wahabbi yang dianut oleh sebagian besar muslim di Timur Tengah dan Afrika, disponsori Saudi Arabia yang mana telah menginspirasi sejumlah kelompok-kelompok eksterimis yang menyebabkan ketidakstabilan di kawasan tersebut.<sup>18</sup> Maroko yang hanya merupakan negara kecil jika dibandingkan dengan Arab Saudi, Turki dan Rusia, namun berani mendirikan sebuah institut pelatihan Imam, *Morchidins* dan *Morchidates* dengan mengeluarkan biaya yang relatif besar, sementara negara besar seperti Turki dan Arab Saudi masih berfokus pada keagamaan dalam kebijakan domestik negaranya.

Dikutip dari tulisan Dr. Mohamed Chtatou, profesor dari *University of Mohammed V* di Rabat yang berpendapat bahwa “*The Imam Academy is, probably, the first organized reaction to the massive fundamentalist tsunami in religious preaching and education*”.<sup>19</sup> Dengan dibangunnya institut pelatihan Imam Mohammed VI yang diatur oleh negara ini membuktikan salah satu bentuk institusionalisasi dari kebijakan Maroko yang mendapat perhatian dari internasional.<sup>20</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Setelah peristiwa serangan teroris di kota Casablanca pada tahun 2003 yang menjadi serangan teror terbesar dalam sejarah Maroko membuat Maroko memperbaharui kebijakan negaranya dalam ruang lingkup agama. *Mohammed VI*

---

<sup>18</sup> Ghita Tadlaoui, “Morocco’s religious diplomacy,” 2.

<sup>19</sup> Mohammed Chatou, “This is something that can easily be copped in other countries of the Muslim world,” Mei 2016, <https://yourmiddleeast.com/2016/05/19/this-is-something-that-can-easily-be-copped-in-other-countries-of-the-muslim-world/> (diakses 15 Agustus 2018).

<sup>20</sup> Meriem El Haitami, “Restructuring Female Religious Authority: State-Sponsored Women Religious Guides (Mushidat) and Scholars (‘Alimat) in Contemporary Morocco,” *Mediterranean Studies*, (2012).

*Institute for the Training of Imams, Morchidins, and Morchidates* didirikan di Rabat, Maroko, merupakan sebuah pusat pembelajaran yang langsung dibawah pengawasan kementrian agama Maroko ini diciptakan dengan tujuan sebagai pusat pelatihan Imam, *Morchidins* dan *Morchidates* dari berbagai Negara, penyebaran nilai islam yang moderat, dan juga sebagai bentuk *joint fight againts terrorism* dari negara-negara yang ikut serta. Pembangunan pusat Akademi yang memakan biaya relatif besar untuk negara *middle-income* seperti Maroko dengan GDP tahun 2015 hanya sebesar 110 juta Dollar, patut untuk dikaji dikarenakan bahkan negara besar seperti Turki dan Arab Saudi belum mengambil langkah institusi seperti ini dalam menjalankan diplomasi agama mereka. Sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana upaya diplomasi religius yang dilakukan Maroko di Afrika Barat melalui pembangunan *Mohammed VI Institute for the Training of Imams, Morchidins, and Morchidates*.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:  
Bagaimana upaya *Religious Diplomacy* Maroko di Afrika Barat melalui *Mohammed VI Institute for the Training of Imams, Morchidins, and Morchidates* ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis upaya diplomasi religius Maroko ke wilayah Afrika Barat melalui *Mohammed VI Institutes for the Training of Imams, Morchidins and Morchidates*.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan kontribusi wawasan serta pengetahuan akademis dalam kajian ilmu Hubungan Internasional mengenai upaya *religious diplomacy* yang dilakukan Maroko di Afrika Barat melalui *Mohammed VI Institute for the Training of Imams, Morchidins, and Morchidates*.
2. Menjadi referensi literasi dalam kajian diplomasi khususnya diplomasi melewati jalur religius atau keagamaan bagi penstudi ilmu Hubungan Internasional yang dapat dianalisis dan diteliti lebih lanjut bagi pihak yang tertarik dengan permasalahan ini.

## 1.6 Studi Pustaka

Penelitian ini melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan informasi serta analisis dari beberapa penelitian terkait. Penelitian pertama yaitu mengenai kebijakan Luar negeri Maroko dijelaskan dalam tulisan yang ditulis oleh Mohammed El-Katiri yang berjudul "*From Assistance to Partnership: Morocco and Its Foreign Policy in West Africa*" yaitu Maroko mulai memperjelas keberadaannya dan hubungan-hubungan dengan negara-negara di Sub-Sahara Afrika dan Afrika Barat.<sup>21</sup> Ketertarikan Maroko di wilayah Sub-Sahara salah satunya didorong oleh kemajuan ekonomi yang pesat di Afrika selama satu dekade terakhir terutama negara yang kaya dengan sumber daya alam. Maroko setelah beberapa tahun terakhir muncul sebagai *key partner* dalam perkembangan berbagai sektor di wilayah-wilayah negara Afrika Barat, dan juga berkeinginan

---

<sup>21</sup> Mohammed El-Katiri, "From Assistance to Partnership: Morocco and Its Foreign Policy in West Africa," *Strategic Studies Institute and U.S Army War College Press*, (November 2015): 27-30.

untuk berkontribusi dalam perdamaian serta stabilitas kawasan yang masih menghadapi berbagai rintangan serta ancaman yang signifikan. Dari tulisan ini dikatakan bahwa Maroko bertujuan untuk mendapatkan posisi sebagai *regional security provider* di wilayah Afrika barat. Maroko memanfaatkan berbagai faktor untuk memperkuat posisinya di Afrika Barat seperti hubungan sejarah, stabilitas politik domestik, pengalaman perkembangan ekonomi dan kelembagaan yang unik, lokasi geografis yang strategis serta hubungan dengan negara-negara Barat. Disisi lain Maroko memiliki tujuan lain yaitu sebagai mitra pilihan atau perantara bagi Amerika Serikat dan organisasi lain yang berusaha mengembangkan minat mereka di Sub-Sahara Afrika. Jika tulisan El-Katiri diatas lebih berfokus membahas secara general tentang kebijakan luar negeri Maroko dengan lebih berfokus pada geopolitik, keamanan, dan ekonomi terkait kepentingan Maroko di wilayah Sub-Sahara Afrika, maka berbeda dengan penelitian ini dimana penulis hanya memfokuskan pada upaya diplomasi keagamaan yang dilakukan Maroko ke Afrika Barat melalui Institut pelatihan Imam Mohammed VI.

Penelitian kedua yang digunakan adalah *Morocco's Religious Diplomacy in Africa* yang ditulis oleh Ghita Tadlaoui.<sup>22</sup> Dalam tulisan ini Tadlaoui menyatakan bahwa Maroko telah mencoba untuk meningkatkan profilnya di Afrika Barat dan wilayah Sahel setelah bertahun-tahun terisolasi dari benua Afrika dengan menggunakan diplomasi keagamaan atau *religious diplomacy*. Berdasarkan tulisan ini Maroko telah menambahkan elemen *religious diplomacy* dalam pendekatan regionalnya, salah satunya yaitu raja Mohammed VI ingin menunjukkan dirinya sebagai otoritas religius berusaha menggunakan wacana

---

<sup>22</sup> Ghita Tadlaoui, "Morocco's religious diplomacy in Africa," *FRIDE Policy Brief*, no.196 (Februari 2015).

Islam moderat untuk membantu membangun ikatan ekonomi dan politik baru. Beberapa tujuan dari diplomasi keagamaan yang dilakukan Maroko menurut penulis yaitu pertama dengan mempromosikan religius yang moderat dengan berbagai upaya, salah satunya pada September 2013 Maroko menandatangani perjanjian dengan Mali untuk pelatihan 500 Imam dari Mali sebagai upaya mempromosikan versi lebih moderat dari Islam di Mali. Hasil dari kerjasama tersebut membuahkan hasil yaitu permintaan dari negara-negara lain seperti Guinea dan Nigeria pada kementerian agama Maroko. Kedua, cita-cita Maroko sebagai pemimpin regional di Afrika, bersaing dengan Algeria sebagai *long-term rival* dengan kata lain Maroko harus meningkatkan *soft power* nya di Afrika (*geostrategic goals*). Ketiga, perlawanan terhadap ekstrimisme di Afrika Utara dan Barat. Terakhir, Maroko juga mendorong ikatan ekonomi dengan sub-Sahara Afrika yang memosisikan negaranya sebagai titik masuk ke benua Afrika bagi investor asing. Tulisan '*Morocco's Religious Diplomacy in Africa*' ini membantu memberikan gambaran *religious diplomacy* Maroko di Afrika secara garis besarnya dan juga motif-motif Maroko di Afrika. Perbedaan dengan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu penulis lebih mempersempit fokus upaya *religious diplomacy* Maroko di Afrika Barat melalui Institut pelatihan Imam Mohammed VI.

Penelitian ketiga berjudul *The Return of Morocco to the African Union* oleh Miguel Hernando de Larramendi dan Beatriz Tome-alonso.<sup>23</sup> Penelitian ini menjabarkan bagaimana Maroko kembali bergabung ke Uni Eropa setelah 34 tahun tidak menjadi anggota organisasi regional tersebut, hal ini dianggap sebagai

---

<sup>23</sup> Miguel H. de Larramendi and Beatriz Tome-Alonso, "The Return of Morocco to the African Union," *IEMed.Mediterranean Yearbook*, (2017).

satu langkah besar dalam diplomasi Maroko. Pada masa kepemimpinan raja Mohammed VI, hubungan-hubungan dengan sub-Sahara Afrika menjadi prioritas kebijakan luar negeri Maroko dengan tujuan sebagai ‘power’ Benua Afrika yang bisa digunakan untuk memimpin kerjasama antara Afrika serta bertindak sebagai jembatan antara benua Afrika dan Uni Eropa. Bergabungnya Maroko kembali ke Uni Afrika tidak hanya dilakukan untuk tujuan ekonomi dan keuangan, hal ini juga menjadi batu pijakan bagi Mohammed VI untuk memperkuat kepemimpinan keagamaannya. Dengan tujuan tersebut institut pelatihan Imam Mohammed VI untuk ulama dibentuk pada Juli 2015 sebagai bentuk promosi dan penyebarluasan serta mengkonsolidasikan nilai-nilai Islam yang toleran. Penelitian diatas berkontribusi dalam memberi informasi dan gambaran hubungan Maroko dengan kawasan regionalnya sehingga dapat membantu menambah informasi untuk menganalisis motif Maroko ke Afrika Barat melalui pembangunan Institut Imam Mohammed VI. Perbedaan tulisan diatas dengan penelitian ini dapat dilihat dari unit analisis yang mana penelitian tersebut menganalisis alasan-alasan Maroko kembali bergabung ke Uni Afrika dan tidak menjelaskan secara rinci tentang *religious diplomacy* Maroko.

Penelitian keempat yaitu “*Religious Regulation as Foreign Policy: Morocco’s Islamic Diplomacy in West Africa*” oleh Ann Marie Wainscott.<sup>24</sup> Dalam tulisannya Wainscott menganalisis regulasi kebijakan luar negeri Maroko dengan menggunakan birokrasi agama. Dalam penelitian penulis memuat bagaimana respon-respon dari elit agama negara-negara penerima tentang

---

<sup>24</sup> Ann Marie Wainscott, “Religious Regulation as Foreign Policy: Morocco’s Islamic Diplomacy in West Africa”, *Religion and Politics Section of the American Political Science Association, Miami University*, (2017).

*religious diplomacy* Maroko ke negara mereka. Waincott berargumen bahwa *religious diplomacy* Maroko dianggap telah berhasil disebabkan tiga faktor yaitu : legitimasi sejarah dan budaya, diplomasi dibangun di atas institusi yang telah ada, serta kerjasama ekonomi yang diperbarui. Penelitian diatas berkontribusi dalam menambah informasi mengenai regulasi agama sebagai politik luar negeri Maroko dengan contoh wilayah Afrika Barat. Perbedaan tulisan diatas dengan penelitian ini adalah unit analisis yang berbicara tentang negara-negara yang meregulasi pasar-pasar religius dari negara lain. Selain itu penelitian diatas memiliki pertanyaan penelitian apa penyebab kesuksesan Maroko dalam *religious diplomacy* negaranya.

Penelitian kelima yaitu “*Turkey’s Religious Diplomacy*” oleh Mehmet Ozkan berbicara tentang ‘*religious diplomacy*’ yang dilakukan Turki.<sup>25</sup> Diplomasi keagamaan di Turki sendiri masih belum dilakukan secara eksklusif di level negara, namun banyak organisasi masyarakat sipil, kelompok agama, dan tokoh-tokoh agama memainkan peran penting didalamnya. Turki telah memasukkan diplomasi keagamaan sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya sebagai alat dalam mengimplementasikan visi dan kebijakannya. Untuk mengembangkan lebih jauh diplomasi keagamaannya, negara anggota EIC tengah mempertimbangkan mendirikan International Eurasian Islamic University, Turki sangat antusias mendukung ide tersebut dan tertarik untuk menjadi tuan rumah dimana pelajar-pelajar ilmu keagamaan dapat mengajar Islam dalam bahasa-bahasa utama di dunia. *Religious diplomacy* telah mulai memainkan peran kunci dalam memperluas pengaruh Ankara, dari Amerika Latin ke Eurasia dan Afrika yang

---

<sup>25</sup> Mehmed Ozkan, “Turkey’s Religious Diplomacy,” *The Arab World Geographer Vol 17*, no 3 (2014).

tidak hanya dilakukan oleh lembaga negara melainkan juga melalui kontribusi aktif dari organisasi masyarakat sipil. Penelitian tersebut berkontribusi dalam membantu penulis untuk memberikan perbandingan dalam analisis motivasi Maroko melakukan *religious diplomacy* di Afrika Barat melalui *Mohammed VI Institutes for the Training of Imams, Morchidhins, and Morchidats*. Perbedaan tulisan di atas dari penelitian ini adalah yang pertama menjelaskan tentang *religious diplomacy* Turki sementara penelitian ini mengambil Maroko sebagai fokus kajian penelitian.

## 1.7 Kerangka Konseptual

### 1.7.1 *Faith-Based Diplomacy*

*Faith-Based Diplomacy* atau diplomasi keagamaan dapat digambarkan sebagai aktivitas negara yang terdiri dari penggunaan faktor agama dalam kebijakan luar negeri; yaitu, seluruh rangkaian mekanisme kerja sama negara dengan asosiasi keagamaan dalam mengejar kepentingan nasional, penggunaan aktivitas internasional dari institusi keagamaan, gagasan dan simbol keagamaan dan lainnya.<sup>26</sup>

*Faith-based diplomacy* memiliki kerangka atribut yang merupakan karakteristik yang memberikan pemimpin dan institusi agama pengaruh yang kuat dalam diplomasi yang tidak dimiliki oleh aktor diplomasi sekuler.<sup>27</sup> *Faith-Based Diplomacy* membedakan diri dari diplomasi tradisional melalui penekanan pada klaim etis atas praksisnya : perdamaian, pemulihan tatanan politik yang kacau

<sup>26</sup> Alicja Curanovic, "The Religious Diplomacy of The Russian Federation," *Russia/NIS Center Report No 12*, (Juni 2012) : 9.

<sup>27</sup> Douglas Johnston, *Faith-Based Diplomacy: Trumping Realpolitik* (New York : Oxford University Press, 2003), hal 12-14.

akibat perang dan ketidakadilan, dan kelompok sosial.<sup>28</sup> “*In the public diplomacy arsenal, religious diplomacy is one of the more benign, “feel good” tools that when deployed correctly- doesn’t feel like conspicuous public relations*”<sup>29</sup>

Dalam interaksi antara diplomatik dan agama menurut Keiswetter dan Chane, terdapat empat cara produktif dalam praktek diplomasi berbasis agama.<sup>30</sup> Pertama, para ulama dapat memberi masukan dan nasehat pada para diplomat, sebagai contoh pada masa Obama, AS membentuk *Religion and Foreign Policy Working Group*, yaitu kelompok yang berisi 100 pemimpin agama dan para pejabat departemen negara memberikan nasehat pada kementerian sekretariat negara. Kedua, para ulama dan pemimpin-pemimpin agama dapat terlibat dalam *track-two or non-governmental diplomacy* karena interaksi tersebut dapat menghasilkan ide-ide inisiatif yang dapat berguna bagi negosiator resmi baik untuk eksplorasi maupun implementasi. Ketiga, konstruktivis sosial langsung, seperti aktivis dari lingkungan para ulama dan pemimpin-pemimpin sosial, dapat melakukan hal-hal untuk masyarakat yang lebih baik. Terakhir, para ulama dan pemimpin agama dapat menawarkan inisiatif yang berupaya menggunakan konsep keyakinan yang sama sebagai sarana membangun rasa kemanusiaan yang sama diantara umat beragama. Sebagai contoh, Presiden Iran meluncurkan *Dialogue of Civilizations* pada 1990-an yang membantu meningkatkan hubungan Iran-Amerika Serikat. Contoh lainnya *Alliance of Civilizations* yang dipromosikan

---

<sup>28</sup> David Joseph Wellman, “The Sage Handbook of Diplomacy,” in *Religion and Diplomacy*, ed Costas M. Constantinou, Paulin Kerr, and Paul Sharp ( London : SAGE Publications Ltd : 2016) 578-585.

<sup>29</sup> Sarah Alaoui, “Morocco’s Religious Diplomacy: To What End?”, *USC Center on Public Diplomacy*, 7 Juni 2018, <https://uscpublicdiplomacy.org/blog/morocco%E2%80%99s-religious-diplomacy-what-end> (diakses 01 Oktober 2018).

<sup>30</sup> Allen Keiswetter and Bishop John Chane, “Diplomacy and Religion : Seeking Common Interests and Engagement in a Diplomacy Changing and Turbulent World,” *U.S.-Islamic World Forum Papers 2013*, (November 2013): 10.

oleh Turki dan dialog antar-agama yang disponsori oleh King Abdullah dari Arab Saudi.

Sejak peristiwa penyerangan 9/11 dan kasus-kasus terorisme lainnya didunia, secara besar di Amerika Serikat, Asia Selatan, Eropa Barat dan Timur Tengah, mazab-mazab pemberontakan berunculan yang menciptakan perspektif buruk tentang agama dapat menjadi penyebab kejahatan ditengah masyarakat.<sup>31</sup> Pada 2002 disusul dengan peristiwa *Arab Spring* yang memberi pengaruh besar terutama bagi negara-negara di Afrika bagian utara yang kemudian memunculkan panggilan-panggilan agar pemerintah menambahkan agama ke dalam strategi-strategi dan program-program kebijakan luar negeri.

#### ***1.7.2 Visi dan Misi 'The Mohammed VI Institutes for the Training of Imams'***

Kebijakan luar negeri Maroko yang mulai memasukkan unsur agama menjadi instrumen bagi Maroko dalam mengupayakan perdamaian, salah satunya dengan Institut pelatihan Imam Mohammed VI yang didirikan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menanamkan generasi baru Imam, *Morchidins* dan *Morchidates* dengan nilai-nilai Islam moderat untuk melindungi Maroko dari upaya ekstremisme,
2. Sebagai upaya melestarikan identitas spiritualnya, yang membawa perbedaan ini dengan menghargai keterbukaan dan toleransi dalam beragama.

---

<sup>31</sup> Paul Sharp, *Diplomatic Theory of International Relations : Crazy Religion Diplomacy*,(New York: Cambridge University Press, 2009), hal 243.

3. Menurut direktur dari Institut pelatihan Imam Mohammed VI, peran dari institut ini adalah untuk mengoreksi interpretasi luas yang digunakan oleh teroris untuk membenarkan konsep-konsep seperti, kesetiaan dan pengingkaran, syura, salafisme dan jihad yang mana konsep tersebut telah cacat dan disalahgunakan.<sup>32</sup>
4. Selain itu, Raja Mohammed VI jelas ingin melindungi keberlangsungan Islam Maliki menghadapi pertumbuhan hegemonik Islam Wahhabi di dunia.<sup>33</sup>

Demi mencapai visi-visi dari institut pelatihan Imam diatas, Institut pelatihan Imam Mohammed VI ini memiliki misi-misi yang dijabarkan dalam *Dahir chérifien* atau keputusan Raja No. 1-14-103 (20 Mei 2014) , diantaranya:<sup>34</sup>

1. Pelatihan dasar para imam, *morchidins* dan *morchidates* untuk melaksanakan misi-misi keagamaan menjadi Imam, pengajar agama, berkhotbah, dan peningkatan kesadaran keagamaan, pengetahuan serta keterampilan para pelajar dalam melaksanakan tugas-tugas mereka;
2. Pelatihan dasar, kualifikasi ulang, dan pendidikan berkelanjutan bagi *foreign religious officers*;
3. Organisasi studi, konferensi, seminar dan kursus-kursus lanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para imam, *morchidins* dan *morchidates* ;

<sup>32</sup> Abdesselam Lazaar, director of Mohammed VI Institute for Imams and Preachers, "Institute teaches next generation of moderate imams," interview Associated Press, <http://www.aparchive.com/metadata/youtube/f7e6cdb44285d57baa1685faf80fcb90> , (diakses pada 22 Maret 2019)

<sup>33</sup> Cedric Baylocq and Aziz Hlaoua, " Spreading Moderate Islam," 9.

<sup>34</sup> Morocco's Islamic Affairs Ministry, "Mohammed VI Institute for Imams Morchidines and Morchidates," (15 September 2017), <http://www.habous.gov.ma/fr/institut-mohammed-vi-pour-l-information-des-imams,-morchidines-et-morchidatesi.html> (diakses pada 25 Mei 2019).

4. Pengembangan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan layanan para Imam, *morchidins* dan *morchidates*;
5. Pembentukan hubungan kemitraan dan kerja sama dengan lembaga dan badan nasional dan luar negeri untuk mencapai tujuan bersama;
6. Pengembangan, berdasarkan permintaan, untuk konsultasi dan keahlian dalam bidang kompetensi lembaga;
7. Publikasi penelitian dan studi dalam bidang yang diminati.

Dari tujuh misi institut pelatihan Imam Mohammed VI diatas, tiga diantaranya akan digunakan sebagai kerangka berfikir dalam melihat upaya *religious diplomacy* Maroko ke Afrika Barat melalui *The Mohammed Institutes for the Training of Imams, Morchidins and Morchidates*. Tiga misi tersebut diantaranya : *Basic training*; Organisasi studi, konferensi, seminar dan kursus-kursus lanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para imam, *morchidins* dan *morchidates* ; serta pembentukan hubungan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga dan badan internasional untuk mencapai tujuan bersama.

### 1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi dalam sebuah penelitian ilmu Hubungan Internasional digunakan sebagai prosedur bagaimana pengetahuan tentang sebuah fenomena hubungan internasional tersebut diperoleh. Selain itu, metode penelitian juga membantu penulis untuk melakukan penelitian secara sistematis dan konsisten, sehingga nantinya akan didapatkan data dan hasil penelitian yang baik seperti yang diharapkan.

### 1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dengan menggunakan metode penulisan deskriptif, penelitian ini mencoba menjelaskan upaya *religious diplomacy* Maroko di kawasan Afrika Barat melalui ‘*The Mohammed VI Institutes for the Training of Imams, Morchidins and Morchidates*’.

### 1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan waktu yang digunakan untuk menjelaskan upaya *religious diplomacy* Maroko di kawasan Afrika Barat melalui ‘*The Mohammed VI Institutes for the Training of Imams, Morchidins and Morchidates*’ adalah dari tahun 2015 saat institut pelatihan Imam ini diresmikan oleh Raja Mohammed VI, sampai tahun 2019 dimana data terbaru dapat dijabarkan.

### 1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Tingkat analisis dan unit analisis dalam penelitian hubungan internasional harus ditentukan untuk kefokusannya dalam membahas permasalahan yang diangkat. Dengan menentukan objek tingkat analisis dan unit analisis, peneliti bisa fokus untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena hubungan internasional. Unit analisis yaitu perilaku objek yang menjadi landasan keberlakuan pengetahuan yang digunakan sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang menjadi penjelas dari unit analisis.<sup>35</sup> Maka, berdasarkan uraian di atas, unit analisis dalam penelitian ini adalah Maroko dengan unit eksplanasi *The Mohammed VI Institute for the Training of Imams, Morchidins, and Morchidates* dan level analisis yaitu negara, yakni Maroko dan Negara-negara Afrika Barat.

---

<sup>35</sup> Joshua S. Goldstein, John C. Pavehouse, *Level of Analysis* (London : Pearson International Edition International Relations, Eighth Edition, 2007) halaman 17

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka berbasis internet. Sumber-sumber utama yang digunakan adalah jurnal, surat kabar, buku, majalah dan lainnya yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya di internet.<sup>36</sup> Penelitian ini memakai 11 jurnal utama mengenai Diplomasi religius Maroko; Jurnal ilmiah seperti “*Religious Regulation as Foreign Policy : Morocco’s Islamic Diplomacy in West Africa*” yang ditulis oleh Ann Marie Wainscott, buku “*Faith-based diplomacy: Trumping Realpolitik*” oleh Douglas Johnston, kemudian tulisan-tulisan dan surat kabar yang di rilis di website seperti Aljazeera, BBC, VOA, serta website resmi *Ministry of Islamic Affairs* Maroko yang menjadi sumber utama informasi lengkap perihal visi, misi, tujuan dan program-program dalam *The Mohammed VI Institute for the Training of Imams, morchidins, and Morchidates*. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian data penelitian yaitu Maroko, *faith-based diplomacy*, *religious diplomacy*, Afrika Barat, dan *The Mohammed VI Institutes for Training of Imams, Morchidins and Morchidates, training of Imams, counter-terrorism, Islamist extremism*, kebijakan luar negeri, *unity in diversity*, *Inclusion*, *peaceful resolution*, *forgiveness*, dan *social justice*.

#### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan sesuai dengan konsep dan teori yang dipakai dan menjadikan data yang ada sebagai indikator untuk konsep yang digunakan dan peneliti akan melakukan analisa terhadap hubungan variabel-variabel yang

---

<sup>36</sup> Umar Suryadi Bakry, *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional* (Yogyakarta, Deepublish, 2016), 28.

diteliti.<sup>37</sup> Dalam penelitian pertama peneliti menguraikan variabel independen dan variabel dependen. Setelah itu peneliti menganalisis upaya diplomasi religius yang dilakukan Maroko di Afrika Barat melalui *The Mohammed VI Institute for The Training of Imams, Morchidins, and Morchidates* dengan menggunakan konsep *Faith-Based diplomacy* yang memiliki lima tujuan; *Unity in diversity, Inclusion, the peaceful resolution, forgiveness for healthy relationship, dan sosial justice*. Kelima tujuan ini nantinya akan dikaitkan dengan misi-misi yang dilakukan di Institut pelatihan Imam Mohammed VI yang diuraikan dalam kurikulum serta kelas-kelas, konferensi, dan kerjasama yang dibangun untuk mendapatkan hasil bagaimana upaya diplomasi keagamaan Maroko melalui Institut ini untuk mencapai tujuan dari *faith-based diplomacy*.

## 1.9 Sistematika Penulisan

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Signifikansi Kawasan Afrika Barat Bagi Maroko**

Bab ini menjelaskan tentang pentingnya kawasan Afrika Barat bagi Maroko.

---

<sup>37</sup>John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Forth Edition*, (USA: SAGE Publications, 2014) :110.

### **BAB III : Dinamika *Religious Diplomacy* Maroko di Afrika Barat**

Bab ini memberikan gambaran tentang dinamika diplomasi keagamaan Maroko di beberapa negara di Afrika Barat melalui ‘*The Mohammed VI Institutes for the Training of Imams, Morchidins and Morchidates*’.

### **BAB IV : Analisis Upaya *Religious Diplomacy* Maroko melalui ‘*The Mohammed VI Institutes for the Training of Imams, Morchidins and Morchidates*’ di Kawasan Afrika Barat.**

Bab ini menjelaskan analisis motivasi *religious diplomacy* Maroko di kawasan Afrika Barat pada tahun 2015-2018.

### **BAB V : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

